

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN
DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO**

KERTAS KERJA WAJIB



DISUSUN OLEH:

EVAN APITTA SEMBIRING PANDIA

2201004

**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI OTOMOTIF**

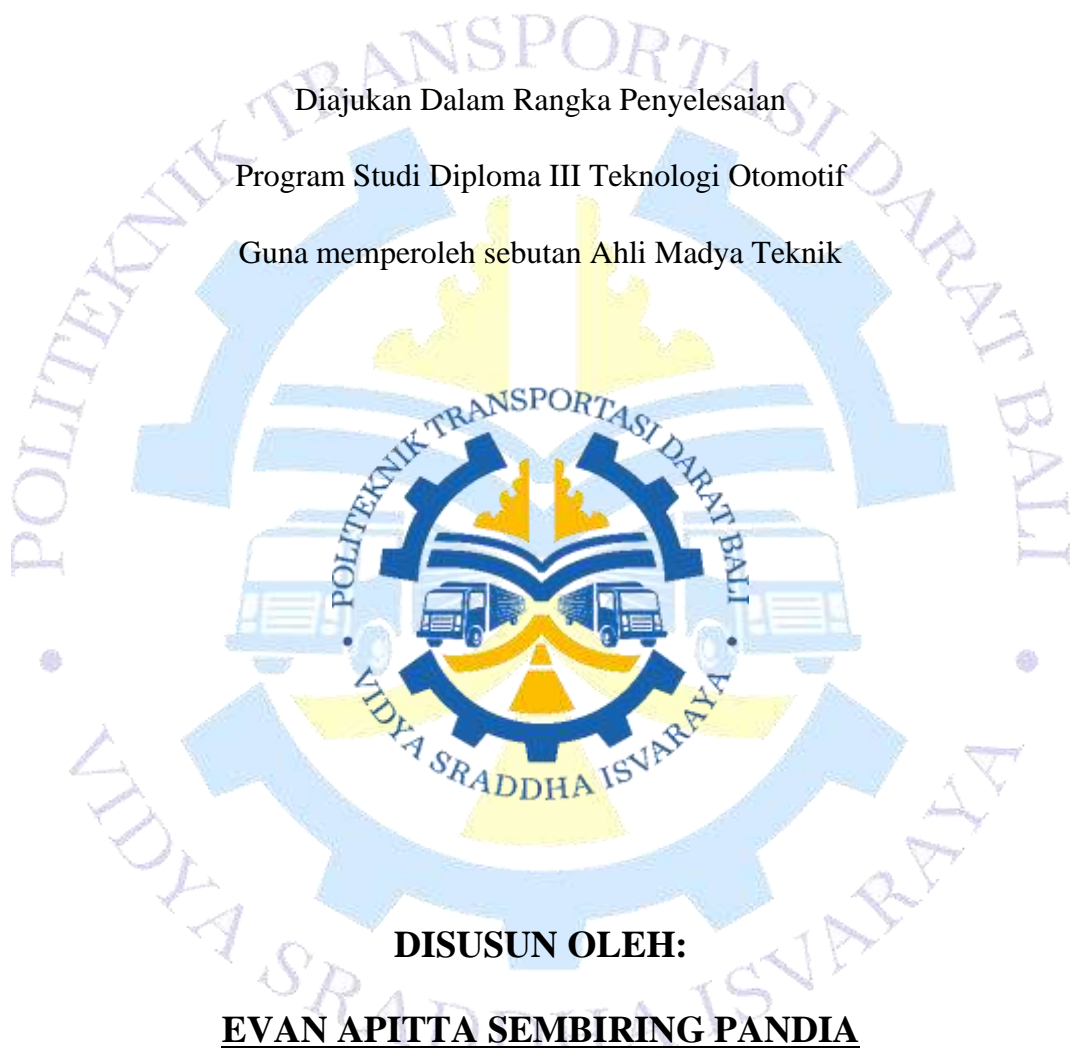
2025

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN
DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO
KERTAS KERJA WAJIB**

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian

Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif

Guna memperoleh sebutan Ahli Madya Teknik



DISUSUN OLEH:

EVAN APITTA SEMBIRING PANDIA

2201004

**POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI OTOMOTIF**

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
KERTAS KERJA WAJIB
ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN
DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO**

Disusun oleh:

EVAN APITTA SEMBIRING PANDIA

2201004

Disetujui untuk diajukan pada
Sidang Akhir Kertas Kerja Wajib
Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING I

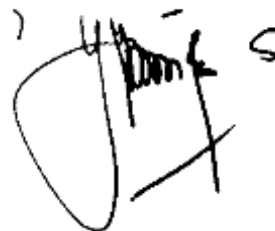
DOSEN PEMBIMBING II



Surya Aji Ermanto, M.Si

NIP. 19910207 201902 1 002

Tanggal : 04 Juli 2025



Yusime Fitasari, S.T., M.Si

NIP. 19910314 201012 2 001

Tanggal: 04 Juli 2025

Ditetapkan di : Tabanan

HALAMAN PENGESAHAN

KERTAS KERJA WAJIB

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN
DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO**

Telah dipersiapkan dan disusun oleh:





EVAN APITTA SEMBIRING PANDIA

2201004

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

PADA TANGGAL 04 JULI 2024

Tim Penguji

	
Riz Rifai Oktavianus Sasue, S.T., M.Eng NIP. 19861014 201902 1 002	Surya Aji Ermanto, M.Si NIP. 19910207 201902 1 002
	
Arif Devi Dwipayana, S.T., M.M., M.T NIP. 19851102 201902 1 003	Yusime Fitasari, S.T., M.Si NIP. 19910314 201012 2 001

Mengetahui,

KETUA PROGRAM STUDI

D-III Teknologi Otomotif



Adrian Pradana, S.T., M.Si

NIP. 19900130 201012 1 005

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya, Evan Apitta Sembiring Pandia, Notar. 2201004, menyatakan bahwa Kertas Kerja Wajib dengan judul “**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO**” merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam Kertas Kerja Wajib ini merupakan hasil penelitian yang saya susun sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka. Selain itu, tidak ada bagian dari Kertas Kerja Wajib ini yang telah digunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar Ahli Madya atau keserjanaan maupun sertifikat Akademik di suatu Perguruan Tinggi.

Jika pernyataan diatas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Darat Bali.

Tabanan, 04 Juli 2025

Penulis,



Evan Apitta Sembiring Pandia

2201004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Karena Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

Amsal 23:18

PERSEMBAHAN

Terpujilah Tuhan Yesus atas seluruh penyertaan serta berkat yang diberikan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu membantu saya setiap hari dan selalu memberikan petunjuknya atas seluruh permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih telah membantu saya untuk keluar dari kegelapan menuju terang sehingga saya bisa untuk menyelesaikan tugas akhir saya.

Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ayah saya, Ellyas Vonka Sembiring Pandia yang selalu memberikan motivasi serta doa setiap saya merasa bimbang akan kemampuan saya sendiri.

Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu saya, Martiana Br. Tarigan yang selalu menjadi tempat cerita saat saya merasa tidak mampu untuk melakukan ini semua.

Terima kasih sebesar-besarnya untuk Adik saya, Rio Epindonta Sembiring Pandia yang selalu mendukung saya serta menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada saya sehingga menjadi motivasi untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih untuk Michael, Rio, Esra, Ardi, Neza serta kakak asuh dan saudara asuh saya Kak Grendys, Kaka Meida, Kak Rania dan Yogi yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

Untuk diri sendiri yang telah melalui semua rintangan walau penuh dengan kebimbangan, untuk seluruh keberanian menghadapi semua tantangan, untuk langkah yang tetap bergerak meski sempat goyah, untuk versi diri terbaru yang selalu mencoba untuk menepis semua haru serta untuk setiap perjuangan yang telah dilakukan hingga saat ini. Terima kasih, karena tidak pernah benar-benar berhenti.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kertas Kerja Wajib yang berjudul **“ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian Kertas Kerja Wajib ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Firga Ariani, S.E., M.M. Tr, selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali;
2. Bapak Adrian Pradana, A.ma PKB., S.T.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif;
3. Bapak Surya Aji Ermanto, M.Si dan Ibu Yusime Fitasari, S.T., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran selama pelaksanaan penyusunan tugas akhir ini;
4. Bapak Erwansyah, S.Sos., MMTr. selaku Kepala UPPKB Cilincing, Bapak Muhammad Irlan Ruslan, S.STP., Msi selaku Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Manado serta Bapak Amin Iswahyudi, S.Sos Selaku Kepala UPT PKB Kabupaten Sidoarjo.
5. Seluruh dosen program studi Teknologi Otomotif di Politeknik Transportasi Darat Bali atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
6. Seluruh Pegawai Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing, Makassar dan Sidoarjo atas ilmu yang telah diberikan selama penyusunan laporan tugas akhir ini;
7. Ibu, bapak dan adik yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
8. Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Diploma III Teknologi Otomotif angkatan III;

9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini.

Penulis menyadari bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

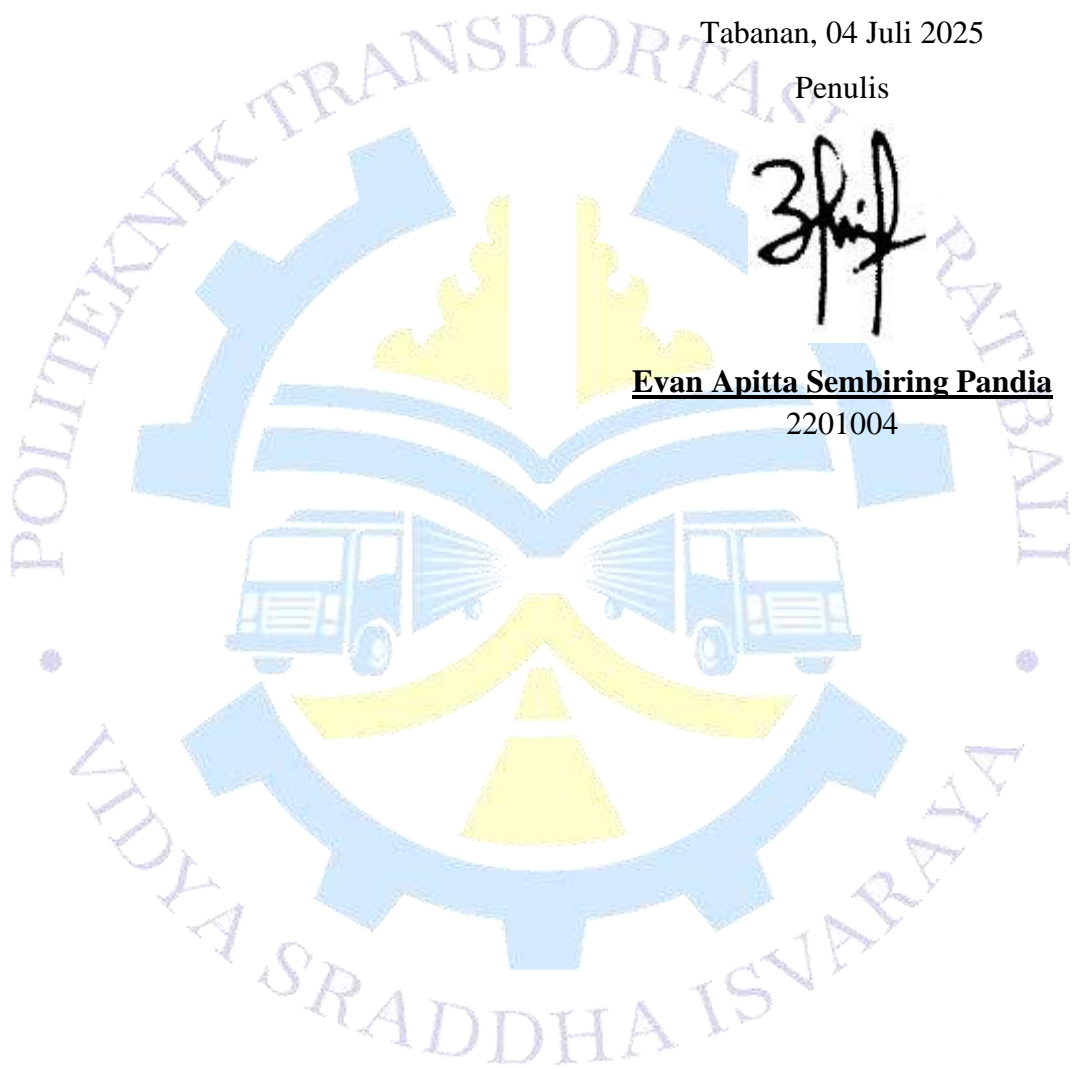
Tabanan, 04 Juli 2025

Penulis



Evan Apitta Sembiring Pandia

2201004



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KERTAS KERJA WAJIB.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM.....	6
2.1 Kondisi Wilayah.....	6
2.2 Kondisi Objek.....	6
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	7
3.1 Landasan Teori	7
3.2 Penelitian Terdahulu.....	11

BAB IV METODE PENELITIAN	13
4.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	13
4.2 Metode Analisis Data	15
4.3 Bagan Alir Penelitian	18
4.4 Timeline Kegiatan Penelitian	21
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	22
5.1 Uji Validitas	22
5.2 Uji Reliabilitas	26
5.3 Uji Normalitas	28
5.4 Uji Multikolinearitas	30
5.5 Uji Heteroskedastisitas	31
5.6 Uji Regresi Linier Berganda	33
5.7 Uji T	35
5.8 Uji F	37
5.9 Koefisien Determinasi	38
5.10 Analisis Deskriptif	39
BAB VI KESIMPULAN	44
6.1 Kesimpulan	44
6.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Total kendaraan yang melaksanakan pengujian
Error! Bookmark not defined.

Tabel 2. 2 Penelitian terdahulu 11

Tabel 3. 1 Timeline kegiatan penelitian 21

Tabel 5. 1 Hasil uji reliabilitas Kota Cilincing 27

Tabel 5. 2 Hasil uji reliabilitas Kota Makassar 27

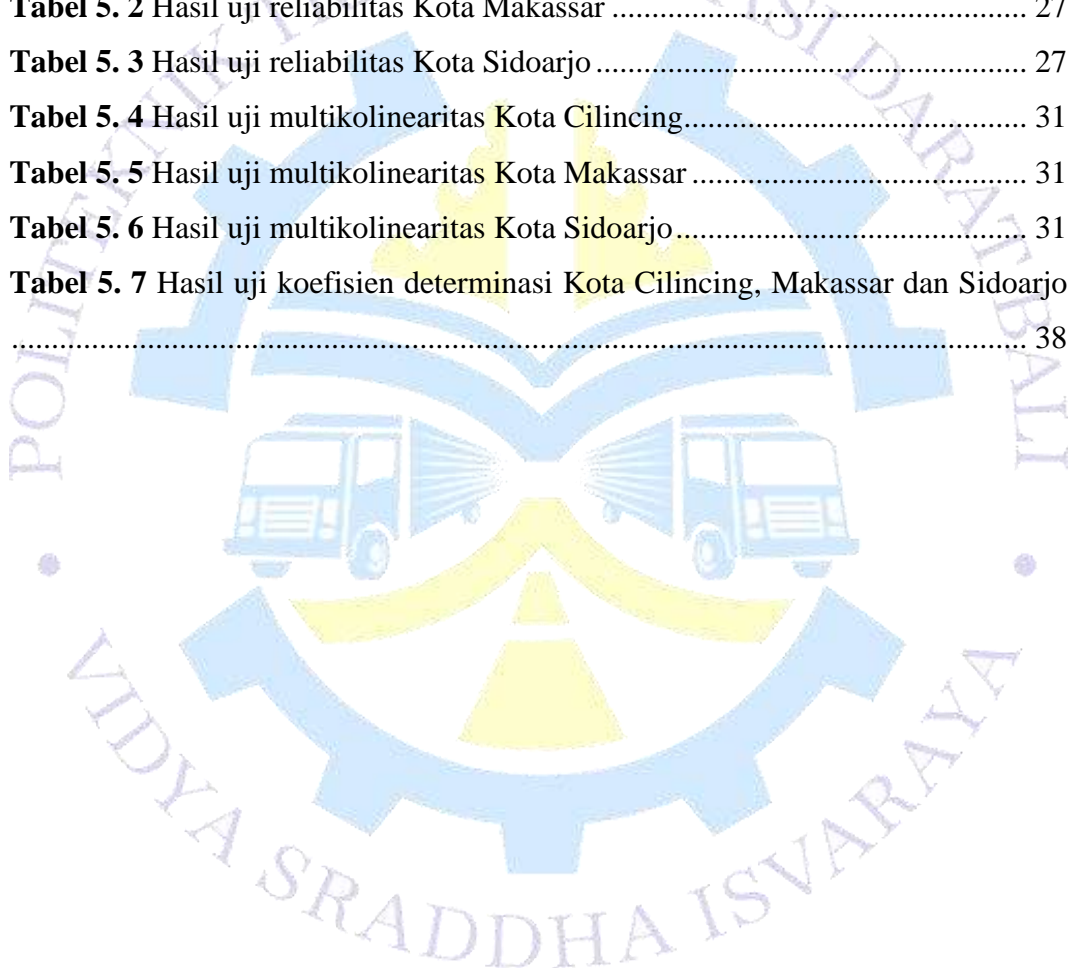
Tabel 5. 3 Hasil uji reliabilitas Kota Sidoarjo 27

Tabel 5. 4 Hasil uji multikolinearitas Kota Cilincing..... 31

Tabel 5. 5 Hasil uji multikolinearitas Kota Makassar 31

Tabel 5. 6 Hasil uji multikolinearitas Kota Sidoarjo 31

Tabel 5. 7 Hasil uji koefisien determinasi Kota Cilincing, Makassar dan Sidoarjo
..... 38



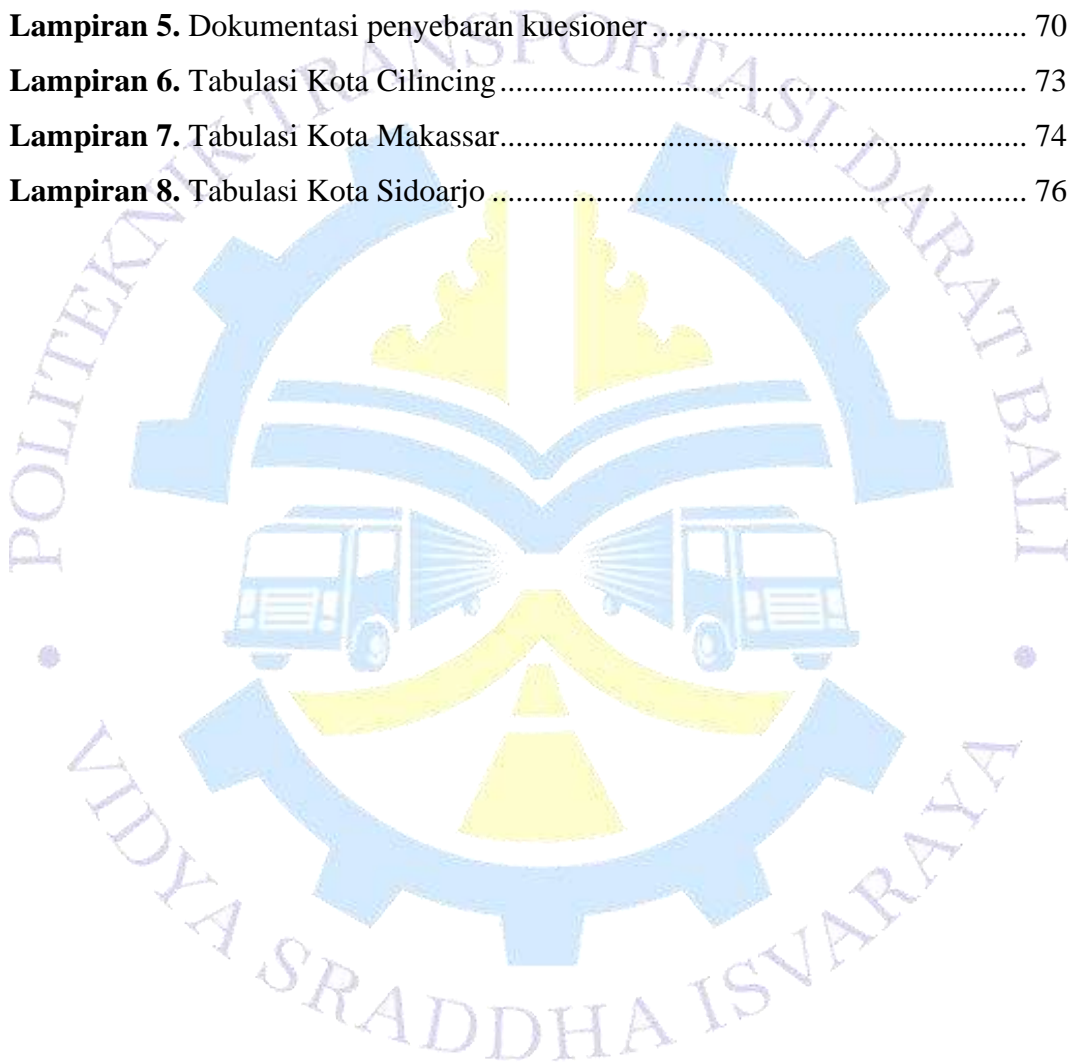
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen	17
Gambar 2. Bagan alir penelitian	20
Gambar 3. Hasil uji validitas kepatuhan masyarakat Kota Cilincing.....	22
Gambar 4. Hasil uji validitas kebijakan retribusi Kota Cilincing	23
Gambar 5. Hasil uji validitas kepatuhan masyarakat Kota Cilincing.....	23
Gambar 6. Hasil uji validitas kesadaran masyarakat Kota Makassar.....	24
Gambar 7. Hasil uji validitas kebijakan retribusi Kota Makassar	24
Gambar 8. Hasil uji validitas kepatuhan masyarakat Kota Makassar	25
Gambar 9. Hasil uji validitas kesadaran masyarakat Kota Sidoarjo.....	25
Gambar 10. Hasil uji validitas kebijakan retribusi masyarakat Kota Sidoarjo...	26
Gambar 11. Hasil uji validitas kepatuhan masyarakat Kota Sidoarjo	26
Gambar 12. Hasil uji normalitas dengan pp plot Kota Cilincing	28
Gambar 13. Hasil uji normalitas dengan kolmogorov-smirnov Kota Cilincing	28
Gambar 14. Hasil uji normalitas dengan pp plot Kota Makassar.....	29
Gambar 15. Hasil uji normalitas dengan kolmogorov smirnov Kota Makassar	29
Gambar 16. Hasil uji normalitas dengan pp plot Kota Sidoarjo.....	30
Gambar 17. Hasil uji normalitas dengan kolmogorov smirnov Kota Sidoarjo ..	30
Gambar 18. Hasil uji heteroskedastisitas Kota Cilincing	32
Gambar 19. Hasil uji heterokedastisitas Kota Makassar	32
Gambar 20. Hasil uji heterokedastisitas Kota Sidoarjo.....	33
Gambar 21. Hasil uji regresi linier berganda Kota Cilincing	33
Gambar 22. Hasil uji regresi linier berganda Kota Makassar.....	34
Gambar 23. Hasil uji regresi linier berganda Kota Sidoarjo	34
Gambar 24. Hasil uji t Kota Cilincing.....	35
Gambar 25. Hasil uji t Kota Makassar	36
Gambar 26. Hasil uji t Kota Sidoarjo	36
Gambar 27. Hasil uji f Kota Cilincing.....	37
Gambar 28. Hasil uji f Kota Makassar	37
Gambar 29. Hasil uji f Kota Sidoarjo.....	38

Gambar 30. Hasil uji deskriptif variabel kesadaran masyarakat pertanyaan pertama.....	39
Gambar 31. Hasil uji deskriptif variabel kesadaran masyarakat pertanyaan kedua	40
Gambar 32. Hasil uji deskriptif variabel kesadaran masyarakat pertanyaan ketiga	40
Gambar 33. Hasil uji deskriptif variabel kesadaran masyarakat pertanyaan keempat	40
Gambar 34. Hasil uji deskriptif variabel kesadaran masyarakat pertanyaan kelima	40
Gambar 35. Hasil uji deskriptif variabel kebijakan retribusi pertanyaan pertama	41
Gambar 36. Hasil uji deskriptif variabel kebijakan retribusi pertanyaan kedua	41
Gambar 37. Hasil uji deskriptif variabel kebijakan retribusi pertanyaan ketiga	41
Gambar 38. Hasil uji deskriptif variabel kebijakan retribusi pertanyaan keempat	42
Gambar 39. Hasil uji deskriptif variabel kebijakan retribusi pertanyaan kelima	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir asistensi bimbingan.....	48
Lampiran 2. Dokumentasi asistensi bimbingan	50
Lampiran 3. Lembar validasi kuesioner	54
Lampiran 4. Hasil penyebaran Kuesioner	58
Lampiran 5. Dokumentasi penyebaran kuesioner	70
Lampiran 6. Tabulasi Kota Cilincing	73
Lampiran 7. Tabulasi Kota Makassar.....	74
Lampiran 8. Tabulasi Kota Sidoarjo	76



INTISARI

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO

Oleh

Evan Apitta Sembiring Pandia
2201004

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting dalam menurunkan risiko kecelakaan di jalan. Pengujian dilaksanakan setiap enam bulan sekali atau dua kali dalam satu tahun. Dalam pelaksanaan pengujian, kepatuhan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu meningkatkan keselamatan di jalan raya. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai perbedaan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada tiga wilayah yaitu UPT PKB Cilincing, Makassar dan Sidoarjo setelah diberlakukannya kebijakan nol retribusi mulai 4 Januari 2024. Variabel yang diteliti meliputi kesadaran masyarakat dan kebijakan retribusi sebagai variabel bebas, serta kepatuhan masyarakat sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan aplikasi *SPSS*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Cilincing, kedua variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan masyarakat dan berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa penurunan di Makassar disebabkan oleh variabel kesadaran masyarakat, sedangkan di Sidoarjo disebabkan oleh variabel kebijakan retribusi. Dalam pemberian rekomendasi untuk hasil analisis dari penelitian ini dilakukan bertahap mulai dari aspek kognitif, afektif dan perilaku.

Kata kunci: Kepatuhan masyarakat, kebijakan nol retribusi, kesadaran masyarakat, pengujian kendaraan, regresi linier berganda

ABSTRACT

ANALYSIS OF DIFFERENCES IN PUBLIC COMPLIANCE LEVELS IN CONDUCTING VEHICLE INSPECTIONS AT UPT PKB CILINCING, MAKASSAR, AND SIDOARJO

By

Evan Apitta Sembiring Pandia
2201004

The implementation of motor vehicle testing is an important component in reducing the risk of road accidents. Testing is carried out every six months, or twice a year. In this process, public compliance plays a vital role in improving road safety. This study aims to analyze the differences in the level of public compliance in carrying out motor vehicle testing across three regions: UPT PKB Cilincing, Makassar, and Sidoarjo, following the implementation of the zero-retribution policy on January 4, 2024. The variables examined include public awareness and the retribution policy as independent variables, and public compliance as the dependent variable. The research method uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and the coefficient of determination, assisted by the SPSS application.

The results of the study show that in Cilincing, both independent variables have a significant influence simultaneously and partially on public compliance. Based on the descriptive analysis, the decline in compliance in Makassar is caused by the public awareness variable, while in Sidoarjo it is due to the retribution policy variable. Recommendations based on the analysis results of this study are provided in stages, beginning with the cognitive aspect, followed by the affective and behavioral aspects.

Keywords: *Public compliance, zero retribution policy, public awareness, vehicle inspection, multiple linear regression.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengujian kendaraan bermotor merupakan faktor penting sistem transportasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas serta mengurangi risiko kecelakaan akibat kendaraan tidak laik jalan. Pengujian yang dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menekankan kewajiban untuk melaksanakan pengujian secara berkala. Selain sebagai syarat untuk operasional kendaraan, pengujian ini juga berfungsi sebagai tindakan preventif pemerintah terhadap meningkatnya resiko kecelakaan. Berkaitan dengan hal ini, kepatuhan masyarakat dalam pengujian masih menjadi hal yang sangat penting pada suatu daerah. Ketika kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian berkala mengalami penurunan, maka risiko terjadi kecelakaan di jalan raya menjadi meningkat, dan hal ini bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pengujian yang tujuannya untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalan.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan pengujian, maka diterapkan sebuah kebijakan penghapusan biaya retribusi pengujian kendaraan yang mulai berlaku pada tanggal empat Januari 2024. Harapannya, kebijakan ini mampu untuk mendorong kepatuhan masyarakat dengan menghilangkan beban biaya yang selama ini dianggap sebagai salah satu hambatan. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kunci penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Mendrofa dkk., 2023). Dengan dilakukannya penghapusan tarif retribusi ini, maka diharapkan tidak adanya masyarakat yang menunda atau menghindari kewajiban pengujian berkala dan masyarakat dapat lebih tertib serta hasil ini akan memberi dampak yang positif terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas.

Tabel 1. 1 Total kendaraan yang melaksanakan peengujian

No	Lokasi	2022	2023	2024
1	Cilincing	6.047	10.420	75.556
2	Makassar	18.927	13.109	9.351
3	Sidoarjo	41.815	39.247	33.372

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan adanya perbedaan tingkat kepatuhan masyarakat setelah diberlakukannya kebijakan. Pemilihan ketiga lokasi ini dikarenakan adanya perbedaan geografis serta karakteristik dari daerah tersebut dimana Cilincing merupakan wilayah yang padat pada bagian Jakarta Utara dengan kendaraan yang mendominasi yaitu mobil barang, Makassar sebagai kota terbesar pada pulau Sulawesi dan mewakili bagian timur Indonesia serta Sidoarjo yang juga merupakan wilayah metropolitan Surabaya dan mewakili bagian barat Indonesia. Pada lokasi pengujian Cilincing, penerapan kebijakan ini berhasil meningkatkan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan pengujian. Jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala meningkat secara signifikan. Akan tetapi, kondisi yang berbeda terjadi pada lokasi pengujian Makassar dan Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang untuk mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian belum tentu memberikan dampak yang sama di setiap daerah. Perbedaan ini menimbulkan sebuah masalah tentang apa saja hal yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan di masing-masing lokasi.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dapat ditentukan oleh pelaksana kebijakan tersebut dan juga dukungan yang diberikan untuk penerapan kebijakan tersebut dalam hal ini yaitu masyarakat sehingga hal-hal tersebut merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan kebijakan (Agindawati, 2019).Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing berhasil menerapkan kebijakan ini berdasarkan naiknya jumlah kendaraan yang melaksanakan pengujian. Sementara pada lokasi pengujian Makassar dan Sidoarjo, kebijakan telah dilakukan namun dukungan pada kondisi lapangan tidak menunjukkan hasil yang baik. Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah gap dimana adanya jarak antara tujuan kebijakan dengan hasil nyata di lapangan.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting dikarenakan menyangkut keselamatan publik dan efektivitas pengelolaan transportasi. Oleh karena itu, penelitian yang melakukan penelaahan secara komparatif terhadap tiga daerah dengan hasil implementasi yang berbeda dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan ini serta dapat menjadi rekomendasi untuk lokasi pengujian yang mengalami penurunan.

Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada “**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENGUJIAN DI UPT PKB CILINCING, MAKASSAR DAN SIDOARJO**”. Dengan melakukan perbandingan daerah yang berhasil dengan yang belum berhasil, diharapkan dapat menemukan solusi yang dapat digunakan untuk implementasi kebijakan yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian ini, kendala yang dialami oleh penulis dirumuskan menjadi dua bagian yaitu:

1. Apakah ada hubungan signifikan antara tingkat kesadaran masyarakat dan kebijakan retribusi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian Kota cilincing?
2. Apa penyebab terbesar menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Makassar dan Sidoarjo?
3. Apa solusi yang dapat diberikan untuk lokasi pengujian berkala yang mengalami penurunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah serta latar belakang tersebut, penulis menetapkan dua sasaran yaitu:

1. Menganalisis hubungan antara kesadaran masyarakat dan kebijakan retribusi yang berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan masyarakat melaksanakan pengujian pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing.

2. Menganalisis penyebab penurunan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Makassar dan Sidoarjo.
3. Memberikan solusi untuk lokasi pengujian berkala yang mengalami penurunan kepatuhan

1.4 Manfaat Penelitian

Mengingat tujuan penelitian tersebut, penulis memiliki harapan agar penelitian ini memberi manfaat yaitu:

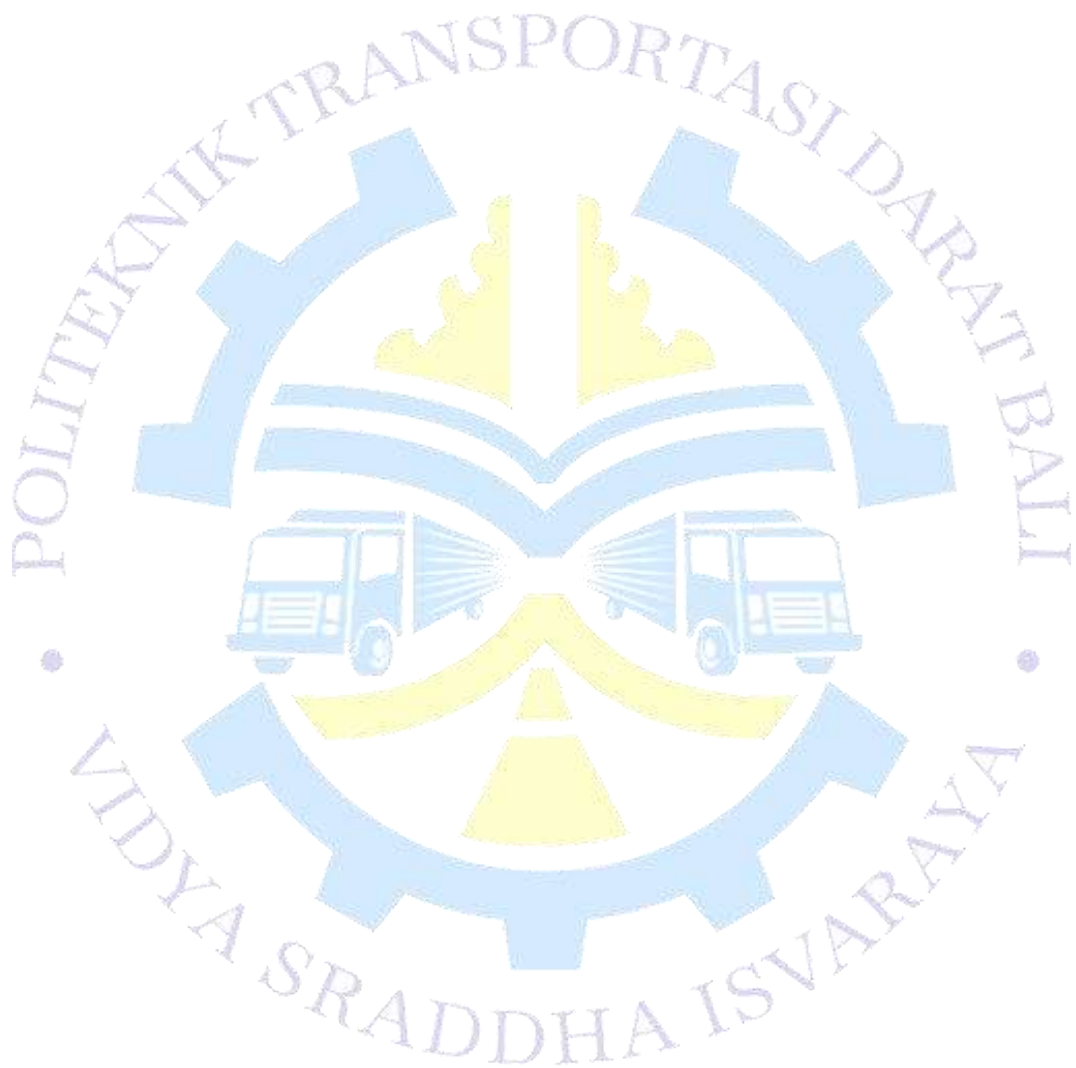
1. Manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan serta pemahaman peneliti terkait implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan nol retribusi dalam pengujian kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dalam melihat perbedaan tingkat kepatuhan masyarakat antar wilayah serta mengidentifikasi faktor yang berpengaruh.
2. Manfaat bagi Pemerintah/Instansi yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan, penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan nol retribusi. Informasi dari hasil penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami penurunan. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong perbaikan pelayanan publik dalam bidang transportasi.

1.5 Batasan Masalah

Untuk hasil yang lebih spesifik, maka diperlukan batasan masalah yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan agar permasalahan tersebut dapat diketahui secara sistematis. Adapun permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian kali ini yaitu:

1. Penelitian ini difokuskan pada tingkat kepatuhan masyarakat berdasarkan kuesioner yang diberikan setelah melaksanakan pengujian berkala di tiga wilayah yaitu Cilincing, Makassar dan Sidoarjo.
2. Penelitian ini tidak mencakup aspek teknis pelaksanaan uji kendaraan maupun detail mekanisme pembiayaan atau keuangan daerah.

3. Evaluasi terhadap kebijakan nol retribusi dilakukan secara terbatas, hanya pada dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat, bukan terhadap keseluruhan isi dan implementasi kebijakan.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Wilayah

Pada penelitian ini penulis mengambil tiga lokasi penelitian yaitu Kota Cilincing, Makassar dan Sidoarjo. Cilincing merupakan daerah dengan cakupan wilayah pelayanan pengujian kendaraan yang relatif padat, serta didominasi oleh kendaraan besar atau mobil barang. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing, sejak diberlakukannya kebijakan nol retribusi pada tanggal 4 Januari 2024, tingkat kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan uji berkala mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 625,11%. Hal ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dan efektivitas pelayanan publik yang berjalan di wilayah tersebut.

Sementara itu, pada lokasi pengujian Makassar dan Sidoarjo menunjukkan kecenderungan yang berlawanan dari lokasi pengujian Cilincing. Kedua wilayah ini mengalami penurunan kepatuhan masyarakat sebesar 28,67% pada Kota Makassar dan 14,97% pada Kabupaten Sidoarjo setelah diterapkannya kebijakan nol retribusi. Beberapa dugaan awal yang muncul seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, kondisi geografis yang menyulitkan akses menuju tempat pengujian, hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya uji berkala untuk keselamatan kendaraan.

2.2 Kondisi Objek

Objek penelitian ini merupakan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala. Kepatuhan yang dimaksud mencakup tindakan nyata masyarakat dalam kesadarannya membawa kendaraannya ke tempat pengujian berkala sesuai dengan ketentuan. Objek penelitian ini dikaji dalam konteks dampak kebijakan nol retribusi dan dilihat dari perbedaan respons masyarakat di tiga wilayah tersebut. Pada penelitian ini, setiap objek akan disebarkan kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat pada tiap kota tersebut terkait kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian berkala.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Kebijakan publik

Kebijakan merupakan bentuk penyelesaian masalah yang ada pada suatu kelompok atau masyarakat (Giantara dan Amiliya, 2021). Maka secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan atau tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu kondisi atau permasalahan tertentu. Sedangkan kebijakan publik adalah sebuah respon pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada pada masyarakat (Herdiana, 2021). Kebijakan publik merupakan bentuk tanggapan pemerintah sebagai otoritas resmi untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok tertentu diluar dari pemerintah tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Salah satu bentuk dari kebijakan publik ini adalah nol retribusi yang sudah berlaku di Indonesia pada tanggal empat Januari 2024. Kebijakan ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka untuk melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor. Kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian berkala dan hal ini juga berdampak terhadap meningkatnya keselamatan lalu lintas dan menurunkan risiko kecelakaan di jalan. Pada penerapannya ternyata kebijakan publik ini tidak sesuai dengan tujuan awalnya dikarenakan masih ada beberapa daerah yang mengalami penurunan yaitu Makassar dan Sidoarjo.

3.1.2 Pelayanan publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan definisi dari pelayanan

publik itu sendiri. Pelayanan publik wajib dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan serta akuntabel serta dapat menjamin kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan penyelenggara pelayanan juga wajib memberikan pelayanan yang adil dan tidak ada diskriminatif. Salah satu bentuk dari pelayanan publik khususnya pada bidang transportasi yaitu pengujian berkala kendaraan bermotor yang dalam hal ini sudah menerapkan kebijakan nol retribusi untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan mengurangi beban masyarakat serta meningkatkan keselamatan lalu lintas.

3.1.3 Kepatuhan masyarakat

Kepatuhan adalah tindakan individu atau kelompok yang taat, patuh dan sadar terhadap suatu hal (Agun, Datrini dan Amlayasa, 2022). Pada penelitian ini, Kepatuhan masyarakat adalah suatu bentuk ketaatan warga dalam melaksanakan serta menanggapi kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara layanan publik. Dalam konteks pengujian berkala kendaraan bermotor, kepatuhan masyarakat mengacu pada kesediaan dan kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan kewajibannya secara rutin dan sesuai peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat uji berkala, maka semakin besar pula kemungkinan mereka akan terlibat secara aktif.

Dalam praktiknya, kepatuhan masyarakat tidak selalu konsisten di semua wilayah. Kepatuhan masyarakat pada lokasi pengujian Cilincing dalam penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah adanya kebijakan nol retribusi, yang memberikan kemudahan dalam hal biaya pengujian. Namun, pada lokasi pengujian Makassar dan Sidoarjo, kepatuhan justru menurun meskipun kebijakan yang sama diberlakukan. Perbedaan ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memahami secara komprehensif dinamika kepatuhan masyarakat agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam jangka panjang.

3.1.4 Pengujian berkala kendaraan bermotor

Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai sebuah proses penilaian teknis terhadap kendaraan yang dilakukan secara rutin guna memastikan kendaraan tersebut laik jalan sehingga membantu menurunkan risiko kecelakaan di jalan raya. Ketentuan mengenai pengujian berkala ini diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tujuan utama dari pelaksanaan uji berkala adalah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan mengurangi potensi kecelakaan akibat kendaraan yang tidak laik jalan. Selain itu, uji berkala juga berperan dalam pengendalian pencemaran lingkungan dari emisi kendaraan bermotor. Dalam implementasinya, kegiatan pengujian dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau lembaga yang diberi kewenangan dan melibatkan pemeriksaan terhadap komponen penting kendaraan seperti sistem pengereman, lampu roda dan emisi gas buang.

Efektivitas dari program ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan pengujian. Apabila kepatuhan masyarakat rendah, maka tujuan dari pengujian berkala akan sulit tercapai. Dalam konteks penelitian ini, ketimpangan kepatuhan antara pengujian Cilincing, Makassar dan Sidoarjo menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program uji berkala. Berdasarkan regulasi yang ada tentunya tiap daerah telah mengikuti ketentuan yang sama, namun untuk hasil dari hal tersebut bisa berbeda karena dipengaruhi oleh faktor lokal seperti pelayanan petugas, sarana dan prasarana, serta kepercayaan masyarakat. Penting untuk melakukan evaluasi dan juga pendekatan kebijakan dan strategi sosialisasi yang diterapkan di masing-masing wilayah.

3.1.5 Kebijakan nol retribusi

Kebijakan nol retribusi merupakan langkah strategis dari pemerintah yang membebaskan masyarakat dari kewajiban membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor, dengan harapan dapat mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melakukan uji berkala. Kebijakan ini mulai berlaku pada 4 Januari 2024 di seluruh daerah, termasuk Cilincing, Makassar dan Sidoarjo sebagai wilayah dalam fokus penelitian. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan di perjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan untuk pengujian kendaraan bermotor tidak lagi dikenakan tarif biaya retribusi. Dengan menghilangkan biaya retribusi, pemerintah berharap hambatan finansial masyarakat bisa ditekan. Kebijakan ini tentunya mendukung tentang keadilan sosial karena kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi dapat mengakses layanan publik yang sama.

Kebijakan ini tentunya bermaksud agar adanya peningkatan kepatuhan masyarakat, kenyataannya hasil dari kebijakan ini tidak seragam. Pengujian pada lokasi Cilincing menunjukkan peningkatan kepatuhan masyarakat, sementara pada pengujian Makassar dan Sidoarjo justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan retribusi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan program. Ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini, seperti sejauh mana kebijakan ini dipahami masyarakat, bagaimana sosialisasinya dilakukan, serta bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hal ini kebijakan nol retribusi perlu dikaji kembali dari sisi implementasi dan penerimaan masyarakat.

3.1.6 Regresi linear berganda

Model dari regresi linear berganda yaitu menggunakan lebih dari satu variabel bebas (Sudariana dan Yoedani, 2022). Metode ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Regresi linear berganda berfungsi untuk menganalisis pengaruh kebijakan retribusi serta kesadaran masyarakat terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana faktor ini mempengaruhi kepatuhan masyarakat dan mengetahui seberapa signifikannya faktor tersebut. Hal ini tentunya penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan data yang ada karena hasil dari implementasi kebijakan ini menunjukkan perbedaan pada tiga wilayah yang diamati yaitu Cilincing, Makassar dan Sidoarjo.

3.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian terkait pengaruh dari kebijakan retribusi dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan masyarakat belum pernah dilakukan dan perlu dilakukan karena adanya gap antara ketiga pengujian yang perlu dianalisis. Penelitian yang baik merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai terhadap judul dan tujuan penulis tersebut. Berikut ini penjabaran dari penelitian yang relevan:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Tandria Shinta Ayuningtyas, Dyah Lituhayu, Endang Larasati, 2024.	Pengaruh tingkat kepentingan dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pemahaman layanan sistem administrasi kendaraan pajak online (SAKPOLE) di kota Semarang.	Tingkat kepentingan berpengaruh positif kepada efektivitas pemahaman layanan aplikasi SAKPOLE serta partisipasi juga berpengaruh positif kepada efektivitas pemahaman layanan aplikasi SAKPOLE.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang diteliti serta variabel yang diteliti karena pada penelitian ini objek yang diteliti atau variabel terikat yaitu kepatuhan masyarakat dan untuk variabel bebas yaitu kebijakan retribusi dan kesadaran masyarakat maka hasil dari penelitian ini tentunya akan berbeda dari penelitian sebelumnya.
2	Nila Sari Agustin dan Rizki Eka Putra, 2019.	Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada samsat kota Batam.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tidak berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang diteliti serta variabel yang diteliti karena pada penelitian ini objek yang diteliti atau variabel terikat yaitu kepatuhan masyarakat dan untuk variabel bebas yaitu kebijakan retribusi dan kesadaran masyarakat maka hasil dari penelitian ini tentunya akan berbeda dari penelitian sebelumnya.
3	Ni Putu Mahindu Pradnya Utami, T dan Putu Sukma Kurniawan, 2020.	Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan tingkat sosialisasi terhadap penerimaan masyarakat menggunakan E-SAMSAT	Pengaruh persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan dan tingkat sosialisasi kepada penerimaan masyarakat memakai E-SAMSAT memiliki pengaruh positif dan signifikan.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang diteliti serta variabel yang diteliti karena pada penelitian ini objek yang diteliti atau variabel terikat yaitu kepatuhan masyarakat dan untuk variabel bebas yaitu kebijakan retribusi dan kesadaran masyarakat maka hasil dari penelitian ini tentunya akan berbeda dari penelitian sebelumnya.

		(Studi Empiris Masyarakat Kota Denpasar).		
4	Januar Sonya Maulani Kusasih dan Nanik Kustiningsih, 2023.	Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Hasil dari penelitian ini menyatakan pelaksanaan program pemutihan samsat Surabaya barat efektif karena mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan menggunakan program pemutihan serta meningkatkan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang diteliti serta variabel yang diteliti karena pada penelitian ini objek yang diteliti atau variabel terikat yaitu kepatuhan masyarakat dan untuk variabel bebas yaitu kebijakan retribusi dan kesadaran masyarakat maka hasil dari penelitian ini tentunya akan berbeda dari penelitian sebelumnya.

